

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Soetardjo Kartohadikoesno berpendapat mengenai arti dari desa dalam tiga istilah yaitu desi, dusun dan desa yang ketiganya bermula dari kata swa desi. Penegasan ini bermakna sama dengan negara, negeri maupun nigari yang bermula dari kata nagaram. Makna ini berasal mula dari kata sanskrit yang memiliki arti tanah air, tanah asal, ataupun tanah kelahiran<sup>2</sup>.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dengan adanya dana desa yang begitu besar maka rawan akan terjadinya praktik korupsi. Pada tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mendapati banyak kasus korupsi mengenai dana

---

<sup>2</sup> Hartono, *Geografi Jelajahi Bumi dan Alam Semesta*, (Bandung : Citra Raya,2007)hlm62.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

desa dimana pada setiap tahunnya kasus tersebut pasti meningkat. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dengan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 miliar. Maka dengan adanya kasus seperti ini sangat diperlukan pengelolaan dana desa secara terbuka / transparan oleh setiap Pemerintah Desa<sup>4</sup>.

Efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja<sup>5</sup>.

Kemiskinan merupakan kejadian sosial yang terjadi hampir di seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan disebut sebagai kondisi ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan kehidupan lain yang lebih menunjang. Negara Indonesia hingga saat ini masih banyak mengalami pukulan mengenai permasalahan, diantaranya meliputi : kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Adanya masalah kemiskinan sendiri dianggap sebagai hal yang sudah biasa oleh masyarakat Indonesia. Kondisi kemiskinan itu merupakan suatu hal yang nyata dan berada di tengah-tengah masyarakat desa maupun kota selama puluhan tahun<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Ihsanudin, ICW : *Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp. 40,6 miliar*, (<https://nasional.kompas.com>) diakses pada tanggal 07 maret 2020 pukul 23:19

<sup>5</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang : AE Publishing, 2020)hlm,21.

<sup>6</sup> Henry J.D. Tamboto dan Allen A.Ch. Minongko, *Model Pengentasan Masyarakat Pesisir*, (Malang : CV Seribu Bintang),hal.31.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir yaitu dengan adanya program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah yang diantaranya meliputi penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, memperluas kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dengan system kredit, pembangunan sarana, prasarana dan pendampingan, pelatihan sanitasi dan program lainnya. Mengatasi kemiskinan harus dilakukan dengan cara menyeluruh, yaitu dengan menyangkut seluruh sebab-sebab kemiskinan. Beberapa bagian yang menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan perlu untuk ditindak lanjuti dan lebih di sempurnakan contoh nyatanya, misalnya meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan pelatihan menjadi pengusaha<sup>7</sup>.

Berdasarkan data Kementrian Sosial tahun 2017 ada sebanyak 26,58 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 10,12 persen di Indonesia. Pada tahun 2016 Kabupaten Tulungagung memiliki angka kemiskinan sebanyak 8,23 persen dan pada tahun 2017 turun menjadi 8,04 persen. Meskipun pada tahun 2017 tingkat angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menurun, akan tetapi kepedulian maupun kepekaan demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik dan terbebas dari kemiskinan akan tetap dan terus berjalan melalui berbagai upaya dan inovasi untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola tertentu.

---

<sup>7</sup> Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan*, (Makassar : CV Sosial Politik Genius, 2018),hal.25.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2010 sampai dengan 2013:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan, 2013 – 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	P0 (%)	P1 (%)	P2 (%)	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
2013	91,70	9,07	1,15	0,24	266 290
2014	89,00	8,75	1,11	0,24	277 707
2015	87,37	8,57	1,27	0,30	292 483
2016	84,35	8,23	0,98	0,18	304 518
2017	82,80	8,04	0,82	0,16	314 532
2018	75,23	7,27	0,98	0,21	328 640
2019	70,01	6,74	0,84	0,17	341 651
2020	76,40	7,33	0,72	0,11	362 213

Sumber : Badan Pusat Statistik<sup>8</sup>

Program dan inovasi dalam upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu berikut ini:

1. Pengembangan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI)
2. Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID)
3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Perluasan dan Penguatan Pelatihan Kerja di BLK

<sup>8</sup> <https://tulungagungkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 14 maret 2022 pukul 21:44wib

5. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
6. Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu
7. Pembangunan MCK bagi Warga Miskin
8. Pengembangan Koperasi Wanita<sup>9</sup>

Desa Jarakan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Wilayah desa Jarakan terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 76.135 ha. terbagi dalam dua dusun yaitu dusun bakalan dan dusun krajan. Terdiri dari empat RW dan 18 RT. Adapun jumlah penduduk Jarakan sebanyak 2638 jiwa atau 830 KK, terdiri dari 1288 laki-laki dan 1350 perempuan<sup>10</sup>.

Dana Desa yang di kelola dan di dapatkan oleh Desa Jarakan khususnya pada tahun 2019-2020 ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Dana Desa di Desa Jarakan**

Anggaran (Rp.)	Tahun
772,862,000	2019
758,505,000	2020

Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pihak memiliki peranan yang sangat penting baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi,

---

<sup>9</sup> <https://bappeda.tulungagung.go.id/> diakses pada tanggal 14 maret 2022 pukul 21:47wib

<sup>10</sup> <https://jarakan.tulungagungdaring.id/> diakses pada tanggal 12 febuari 2021 pukul 22:37wib

kabupaten/kota dan masyarakat. Jika tidak adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dalam menyebabkan terkendalanya program dan pemberdayaan masyarakat. Ketidakmampuan dalam pengalokasian dana desa agar tetap tepat sasaran juga dapat mengakibatkan tidak tercapainya prioritas dari dana desa yang telah dialokasikan<sup>11</sup>.

Dengan banyaknya masyarakat miskin yang ada di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini maka PR dari pemerintah desa yaitu berupaya mengatasi dan mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan hal ini masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat ataupun penduduk desa setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Dana Desa memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga peneliti mengangkat judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Implementasi Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan

---

<sup>11</sup> Valentine Siagian, *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*,(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)hlm154

Masyarakat di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana Efektivitas Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tuungagung.
2. Untuk mengetahui implementasi dana desa terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap kemiskinan mayarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh pihak- pihak yang berkaitan. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Maka kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Akhir dari penelitian ini sangat diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah pengetahuan serta dapat mengebangkan pemikirannya tentang pengelolaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan. Dan juga dapat

dijadikan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti bidang yang sama.

## 2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

### a. Bagi Institusi

Bagi Institusi Desa, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menjadi sarana guna untuk bahan pertimbangan dan evaluasi ketika menentukan kebijakan di waktu yang mendatang terutama dalam bidang mengenai pengelolaan dana desa.

### b. Bagi Akademisi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah koleksi perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung guna dapat dijadikan acuan oleh seluruh kalangan seperti akademisi, baik dosen maupun bagi mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan serta referensi oleh peneliti selanjutnya yang juga akan meneliti mengenai pengelolaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan.

## **E. Batasan Masalah**

Keterbatasan pada penelitian ini digunakan untuk mengantisipasi perluasan dari focus penelitian agar lebih spesifik pada inti permasalahan penelitian. Sehingga memudahkan dalam pembahasan dan tercapainya tujuan dari penelitian. Adapun batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Subyek penelitian ini adalah pengelolaan dana Desa Jarakan
- b. Obyek penelitian ini adalah kemiskinan masyarakat Desa Jarakan.
- c. Penelitian ini menggunakan data informasi yang berasal dari wawancara narasumber.
- d. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Jarakan.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dalam pemahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”, maka dijelaskan lebih lanjut masing-masing definisi sebagai berikut:

### **1. Dana Desa**

Dana yang di distribusikan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari keuangan perimbangan dana daerah dan pusat yang diterima oleh Kota/Kabupaten.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pengertian dari Dana Desa adalah Dana yang berawal ataupun bersumber dari belanja daerah dan estimasi perolehan Kota/Kabupaten serta dipakai untuk mengampukan pengelolaan pemerintahan, manifestasi pembangunan, dan pemeliharaan

kemasyarakatan.

Undang-Undang yang diterbitkan oleh pemerintah DPR Indonesia yakni Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, sebagaimana yang dimaksud yaitu untuk memperkuat landasan dalam melakukan system pengelolaan dana desa. Dalam UU tersebut tercantum mengenai peraturan dana Desa dan Aset Desa. Disebutkan di Pasal 27 ayat 1 huruf b bahwasanya penghasilan Desa berawal dari Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan<sup>12</sup>.

Anggaran merupakan sumber dari Dana Desa. Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan diberikan kepada Desa dikirim lewat Belanja Daerah Kota/Kabupaten dan Anggaran Pendapatan. Adanya Dana Desa bertujuan untuk mengurus pengurusan mengenai pemerintahan, manifestasi pembangunan, penegakan masyarakat dan memantapkan masyarakat<sup>13</sup>.

Dana Desa (ADD) dianggap sebagai dana yang lumayan relevan untuk Desa guna membantu rancangan-rancangan Desa. Tujuan dari pendistribusian Dana Desa (ADD) merupakan mengurangi tingkat angka kemiskinan<sup>14</sup>.

#### a. Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada perangkat desa selaku PPKD ketika menjalankan kewenangan ataupun kekuasaannya dalam pengelolaan dana desa. Pengalihan kewenangan

---

<sup>12</sup> Muhammad Zainul Abidin, *Tinjauan Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.6 No.1, 2015),hal.61-76

<sup>13</sup> Kementerian Keuangan RI, 2014

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Nomor 37, Tahun 2007.

PKPKD kepada PPKD menetapkan keputusan kepala desa. Pemisahan tugas Kasi dan Kaur perwujudan urusan taksiran dilakukan berdasar kepada aspek tugas dari masing-masing dan menetapkan ke dalam RKP desa. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) dalam melakukan tugas penyediaan jasa atau barang dikarenakan jenis maupun sifatnya tidak mampu dilakukan sendiri.

Pendapatan desa di kategorisasikan menurut kelompok, objek dan jenis pendapatan. Penggolongan belanja desa di kategorikan menurut kegiatan, bidang, sub bidang, rincian belanja, jenis belanja dan objek belanja. Pembiayaan digolongkan menurut objek pembiayaan, jenis dan kelompok. Kode rekening akan diberikan pada setiap Belanja Desa, Pendapatan Desa serta Pembiayaan.

Reaksi usaha desa, yaitu meliputi bagi hasil via BUMDes. Hasil dari asset meliputi, pasar desa, jaringan irigasi, tanah kas desa, tambatan perahu, serta hasil asset yang lain bertimbal dengan wewenang yang berdasar pada hak kewenangan dan nasal usul local perimbangan desa. Gotong royong, swadaya dan partisipasi merupakan toleransi yang bermula dari pemberian warga desa. Hasil pungutan desa merupakan penghasilan asli desa<sup>15</sup>.

## **2. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Gibson ada 2 pendekatan dalam menilai keefektifan menurut

---

<sup>15</sup> Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur*, (Yogyakarta : Indie Book, 2015)hal.27

tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk perumusan dan penghitungan keefektifan untuk mencapai tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori system yang ditekankan untuk pentingnya penyesuaian terhadap tuntutan dari pihak luar sebagai kriteria penilaian keefektifan, konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 kriteria, yaitu:

- a. Keseluruhan siklus masukan - proses – keluaran
- b. Pencerminan hubungan antara organisasi dan lingkungannya.<sup>16</sup>

### **3. Kemiskinan**

Kemiskinan menunjukkan keadaan ketiadaan kepemilikan dan minimnya pendapatan, atau dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana tidak dapat terpenuhinya suatu kebutuhan yang mendasar oleh setiap manusia yakni mengenai sandang, pangan dan papan. BPS menjelaskan bahwa kemiskinan dianggap sebagai kurangnya kemampuan setiap individu dalam kegiatan memenuhi kebutuhan mendasar minimal untuk hidup layak<sup>17</sup>.

Miskin menggambarkan tanda social yang berlangsung kepada semua Negara baik Negara maju maupun Negara berkembang. Miskin diartikan mengenai tidak mampunya seseorang lanjut guna mewujudkan kebutuhan perekonomian, standart hidup yang lainnya, dan social. Sampai hari ini

---

<sup>16</sup> Boedijono, Galih Wicaksono', dkk, (Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso) Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB), Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1), hal9-20.

<sup>17</sup> Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hal. 4

Indonesia tengah dipukul dengan banyak masalah, antaranya : pengangguran, ketimbangan pendapatan, dan kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan merupakan petunjuk baru untuk masyarakat. Sewaktu puluhan tahun, keadaan miskin itu tetap saja konkret di tengah masyarakat, baik kota maupun di desa<sup>18</sup>.

BPS (Badan Pusat Statistik) mengartikan kemiskinan sebagai patokan ukuran garis miskin guna menakar kemiskinan yang otoriter. Banyak maupun rendahnya jumlah masyarakat miskin banyak responsif oleh garis kemiskinan, masyarakat miskin yaitu masyarakat yang mana mempunyai lazimnya pendapatan rata –rata perbulan berada di bawah gurat miskin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Batas kemiskinan berdasarkan dengan pemasukan yang dipertimbangkan pada ukuran kesejahteraan. Tetapi, batas ini malah tidak mewakili ukuran miskin yang sebetulnya. Karena, kebanyakan orang tidak termasuk miskin jika dilihat dari bidang penghasilan digolongkan menjadi miskin karena minimnya persoalan mengenai bantuan inti dan minimnya indeks kodifikasi masyarakat.<sup>25</sup>

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Sebagaimana penelitian pada umumnya, Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Henry J.D. Tamboto dan Allen A.Ch Minongko, *Model Pengentasan Masyarakat Pesisir*, (Malang : CV Seribu Bintang, 2019), hal.28.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang bersumber dari buku – buku yang berisi teori – teori serta pengertian dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini, keberadaan teori, pengertian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat desa baik yang dirujuk dari buku maupun hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan pembahasan penelitian.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan – tahapan dalam penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai paparan data, dan temuan penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

## **BAB V: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang terkait dengan hasil temuan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat desa

Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

## **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan penutup akhir dari penelitian. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.